

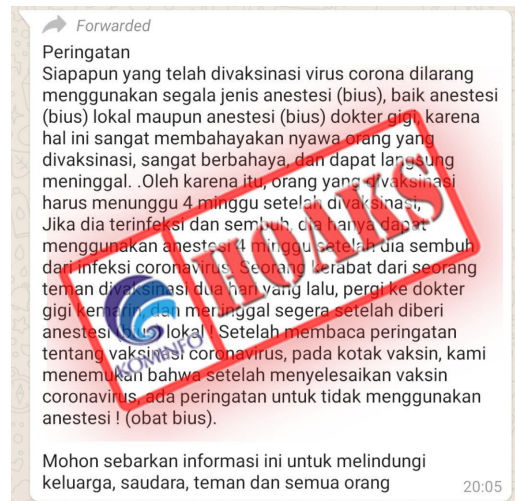
# Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika  
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Selasa, 15 Juni 2021

## 1. [HOAKS] Pemberian Obat Bius usai Vaksinasi Covid-19 Bisa Akibatkan Kematian



### Penjelasan:

Beredar informasi melalui pesan berantai WhatsApp terkait larangan mendapatkan anestesi (obat bius) setelah divaksin Covid-19. Dalam pesan berantai itu menyebutkan pemberian obat bius setelah divaksin Covid-19 dapat mengakibatkan kematian.

Dilansir dari [liputan6.com](https://www.liputan6.com), menurut relawan dan edukator Covid-19, dr. Muhamad Fajri Adda'i mengatakan bahwa informasi dalam pesan berantai tersebut tidak benar. Menurut penjelasan dr. Fajri tidak ada larangan memberikan obat bius atau minum obat-obatan lain setelah divaksin Covid-19, namun yang dilarang adalah obat-obatan yang mengganggu pembentukan sistem imun karena efektivitas vaksin bisa berkurang. Adapun hal tersebut tidak berbahaya atau bisa menimbulkan kematian seperti dalam informasi yang disebutkan pada pesan berantai yang beredar.

**Hoaks**

### Link Counter:

- <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4582029/cek-fakta-tidak-benar-pemberian-obat-bius-usai-vaksinasi-covid-19-bisa-akibatkan-kematian>

# Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika  
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Selasa, 15 Juni 2021

## 2. [HOAKS] Dana Haji Tidak Diaudit karena Uangnya Habis



### Penjelasan:

Telah beredar sebuah narasi yang menyebutkan pemerintah tidak berani mengaudit dana haji dikarenakan uang jemaah yang terkumpul sudah habis.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim dana haji tidak diaudit karena dananya habis adalah salah. Dilansir dari [akurat.co](https://akurat.co), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan laporan keuangan BPKH diaudit secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) "Banyak juga yang membuat tagar 'Dana Haji Diaudit'. Sebagai lembaga negara kami ini sudah rutin diaudit, sejak di Kementerian Agama dana haji selalu diaudit oleh BPK, dan kebetulan mulai 2017-2018 dan sampai sekarang itu diaudit oleh BPK, baik itu audit tahunan maupun semester, bahkan ada audit khusus," paparnya. Dapat disimpulkan bahwa dana haji rutin diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

**Hoaks**

### Link Counter:

- <https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/ObzVnpgb-cek-fakta-dana-haji-tidak-diaudit-ka-rena-uangnya-habis-ini-faktanya>
- <https://akurat.co/tenang-mulai-2017-ternyata-bpk-selalu-audit-dana-haji?page=1>
- <https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Dana-Haji-Tidak-Diaudit-Karena-Uangnya-Habis>

Selasa, 15 Juni 2021

## 3. [HOAKS] Tidak Ada Subsidi Pemerintah Untuk Haji



### Penjelasan:

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa tidak ada subsidi pemerintah untuk haji Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran [medcom.id](https://www.medcom.id), klaim bahwa tidak ada subsidi pemerintah untuk haji adalah salah. Rata-rata biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler yang dibebankan per calon jemaah Indonesia setiap tahunnya adalah sekitar Rp 30 juta-an, padahal biaya yang seharusnya dikeluarkan setiap jemaah hampir dua kali lipat lebih dari yang dibebankan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan subsidi terkait pelaksanaan ibadah haji.

**Hoaks**

### Link Counter:

- <https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/JKRW77ON-cek-fakta-benarkah-tak-ada-subsidi-pemerintah-untuk-haji-indonesia-ini-faktanya>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/bpkh-berikan-dana-subsidi-haji-tahun-2020-sebesar-rp-68-triliun>
- <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/20/02/11/q5im7a282-habsi-haji-subsidi>
- <https://nasional.tempo.co/read/689944/pemerintah-subsidi-jemaah-haji-rp-24-juta>

Selasa, 15 Juni 2021

## 4. [HOAKS] MUI Pakai Dana Sertifikasi Halal untuk Gerakan Melawan Pemerintah



### Penjelasan:

Beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang menyebutkan bahwa MUI tidak melakukan laporan dana sertifikat halal, sehingga dianggap tidak terbuka dan dicurigai menyalahgunakannya untuk melawan pemerintah.

Dikutip dari akun Twitter Ketua MUI [@Cholilnafis](https://twitter.com/Cholilnafis), ia menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia menegaskan bahwa MUI itu setiap tahun diaudit BPK dan akuntan publik. Semua legal dan penggunaannya sesuai aturan dan halal.

**Hoaks**

### Link Counter:

- <https://twitter.com/cholilnafis/status/1401733429402607616>
- <https://kumparan.com/kumparannews/hoaxbuster-mui-pakai-dana-sertifikasi-halal-untuk-gerakan-melawan-pemerintah-1vwghuAZHdl/full>
- <https://www.antaranews.com/berita/2210954/cek-fakta-mui-pakai-dana-sertifikasi-halal-untuk-lawan-pemerintah>

# Laporan Isu Hoaks

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika  
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Selasa, 15 Juni 2021

## 5. [DISINFORMASI] Amandemen Kelima UUD 1945 Jokowi akan Menjabat 3 Periode

### Penjelasan:

Beredar sebuah informasi pada media sosial Facebook mengenai MPR resmi melakukan amandemen kelima UUD 1945 yang menjadikan Presiden Joko Widodo akan menjabat tiga periode.

Dikutip dari cek fakta [medcom.id](https://www.medcom.id), informasi yang menyebutkan MPR resmi melakukan amandemen kelima UUD 1945 dan Presiden Joko Widodo akan menjabat tiga periode adalah salah. Faktanya, Dikutip dari [tempo.co](https://nasional.tempo.co), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memastikan tidak ada agenda untuk mengajukan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode di MPR.



## Disinformasi

### Link Counter:

- <https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/IKYrArPN-cek-fakta-amendemen-kelima-uud-1945-jokowi-akan-jabat-3-periode-ini-faktanya>
- <https://nasional.tempo.co/read/1442377/mpr-belum-ada-usulan-amandemen-uud-1945-agar-presiden-bisa-jabat-3-periode/full&view=ok>